

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia tercermin dalam Pancasila, penjelmaan strukturnya adalah UUD 1945. Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Ketentuan dasar dalam melaksanakan kegiatan ini diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam pasal ini tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Maka bangun perusahaan yang sesuai dengan ini adalah Koperasi.

Dengan kedudukan Koperasi seperti itu, peranan Koperasi sangat mendukung dalam pengembangan potensi ekonomi rakyat dan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi. Tujuan Koperasi bukan mencari keuntungan semaksimal mungkin, tetapi mencapai keperluan hidup bersama yang sejahtera. Peran dan fungsi Koperasi di Indonesia dapat dilihat dari Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4, sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko-gurunya;
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Persoalan mendasar dari perekonomian nasional pada saat ini adalah kelemahan pada basis ekonomi rakyat. Meskipun ekonomi secara agregat berkembang dinamis dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi pelaku ekonomi pada lapisan bawah terjebak ke dalam ekonomi tradisional dan informal. Pelaku ekonomi ini kurang produktif, berpendapatan rendah, dan berkembang dengan lambat terutama akibat minimnya modal usaha yang dimiliki dan persaingan yang tidak seimbang dengan pengusaha elit.

Kebutuhan masyarakat akan modal dan pinjaman, terutama golongan yang tidak mampu mengakses dari perbankan akan terpenuhi dengan keberadaan Koperasi, terutama Koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam dalam unit usahanya. Koperasi dengan jiwa kegotongroyongan mampu memberikan alternatif bagi masyarakat kecil khususnya. Koperasi menjadi sebuah organisasi yang akan membawa kesejahteraan bersama, karena kepemilikan dari bentuk Koperasi adalah anggota Koperasi tersebut, tanggung jawab ada pada anggota Koperasi dan keputusan dibuat atas dasar kebersamaan dan musyawarah.

Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi telah dirasakan diberbagai daerah di Indonesia. Setiap golongan masyarakat terutama golongan menengah kebawah mampu berkembang dibawah naungan Koperasi. Salah satu Koperasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya terutama para petani dan pengusaha kecil di Kecamatan Padakembang adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Karya.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini KUD Tunas Karya memiliki asset lebih dari setengah miliar rupiah. Perkembangan asset KUD Tunas Karya dari tahun 2002 hingga 2007 dapat dilihat pada tabel aktiva dibawah ini :

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Aktiva
KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah Anggota	Jumlah Aktiva	Persentase Pertambahan Aktiva
2002	155	Rp. 527.982.000,-	-
2003	163	Rp. 584.776.900,-	10,75
2004	165	Rp. 610.574.250,-	4,41
2005	187	Rp. 672.329.450,-	10,11
2006	185	Rp. 631.647.400,-	- 6,05
2007	183	Rp. 630.250.100,-	- 0,22

Sumber : Laporan Tahunan KUD Tunas Karya Tahun Buku 2002-2007

Tetapi bukan berarti dalam menjalankan organisasinya berjalan dengan mulus. Hambatan dan rintangan selalu ada baik secara internal maupun secara eksternal. Permasalahan penting yang sedang dihadapi sekarang adalah dalam program pemberian kredit / pinjaman. Seringkali gerak Koperasi mengalami keterlambatan dan ketidaktepatan dalam memantau perkembangan usaha anggota. Kemajuan dan penurunan usaha anggota kurang diperhatikan secara cermat. Selain itu kurang tegasnya pengurus Koperasi dalam penarikan pelunasan pinjaman yang diberikan kepada anggotanya.

Di sisi anggota sendiri, keterpurukan usaha menjadi kondisi yang menyulitkan anggota Koperasi dalam hal ini terutama para petani dan penambang pasir Gunung Galunggung. Para petani harus menghadapi gagal panen serta

persaingan dengan para pengusaha asing yang memiliki modal besar dan memiliki wilayah pertanian yang lebih luas. Dilain pihak, para penambang pasir harus menghadapi biaya produksi yang semakin besar akibat dari semakin mahalnya harga peralatan yang digunakan serta kalah pemasaran dari penambang pasir luar kabupaten.

Rasionalitas dari permasalahan ini adalah munculnya lonjakan kredit bermasalah anggota Koperasi. Perkembangan jumlah kredit bermasalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah
KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya

Tahun	Jumlah anggota terkena kredit bermasalah	Jumlah kredit bermasalah	Persentase Pertambahan Kredit
2002	12	Rp. 19.108.500,-	-
2003	14	Rp. 19.774.000,-	3,5
2004	19	Rp. 23.235.000,-	17,5
2005	19	Rp. 25.831.500,-	10,1
2006	27	Rp. 38.662.000,-	49,7
2007	27	Rp. 38.390.000,-	-0,7

Sumber : Laporan Tahunan KUD Tunas Karya Tahun Buku 2002-2007

Persentase pertambahan jumlah kredit bermasalah terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2006 dengan jumlah kredit mencapai Rp. 38.662.000,-. Sedangkan pada tabel perkembangan jumlah aktiva ironis sekali persentase pertambahan asset mengalami penurunan.

Menurut Siswanto Sutojo (1997: 72), perkembangan suatu kredit menjadi kredit bermasalah disebabkan faktor-faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi kemampuan dan kesediaan debitur dalam melunasi kredit, yaitu sebagai berikut :

1. Wewenang untuk meminjam.
Kredit yang ditarik oleh mereka yang secara hukum tidak berwenang meminjam dapat menjadi kredit bermasalah. Misalnya pinjaman yang ditandatangani direksi namun pemilik perusahaan tidak mengakuinya.
2. Watak debitur
Kredit yang diberikan kepada debitur yang berwatak buruk, besar sekali risikonya untuk menjadi kredit bermasalah.
3. Kemampuan debitur menghasilkan pendapatan dan laba
Apabila kegiatan usaha debitur tidak berjalan lancar atau rugi, kecil kemungkinan mereka mengembalikan kredit dari dana intern perusahaan.
4. Kondisi fasilitas produksi yang dimiliki debitur
Kondisi fasilitas produksi berpengaruh pada perolehan pendapatan yang digunakan untuk mengembalikan kredit.
5. Jaminan kredit yang disediakan
Jaminan kredit adalah sumber dana kedua untuk melunasi kredit.
6. Perkembangan kondisi ekonomi
Kondisi ekonomi berdampak pada operasi bisnis dan keuangan yang sangat berpengaruh terhadap pembayaran kredit.

Sedangkan Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2002:470) menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu kredit menjadi bermasalah adalah :

1. Debitur (Anggota Koperasi)
Pendapatan bersih semakin menurun, peningkatan hutang-hutang yang dimiliki serta biaya-biaya yang dikeluarkan.
2. Bank (Koperasi)
Munculnya kelemahan-kelemahan dalam analisis kredit, pembinaan dan pengawasan, over kredit, dan sebagainya.
3. Eksternal
Kebijakan pemerintah di sektor rill yang kurang tepat, kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, kenaikan harga produksi, bencana alam, dan sebagainya.

Berdasarkan faktor-faktor penyebab kredit bermasalah diatas, lonjakan kredit bermasalah anggota terjadi diduga karena pendapatan anggota pada

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sehubungan dengan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh karakter anggota Koperasi terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan anggota Koperasi terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan kredit oleh pengurus terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ?
4. Bagaimana pengaruh karakter, pendapatan, dan pengawasan kredit terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai :

1. Pengaruh karakter anggota Koperasi terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pengaruh pendapatan anggota Koperasi terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pengaruh pengawasan kredit oleh pengurus terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
4. Pengaruh karakter, pendapatan, dan pengawasan kredit terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap memberikan manfaat antara lain :

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu perkoperasian khususnya mengenai kredit bermasalah anggota, dan dapat dijadikan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Bagi pengurus dan anggota Koperasi diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan saran-saran yang bermanfaat dalam rangka memajukan Koperasi, terutama melalui penanggulangan dan pengendalian kredit bermasalah anggota Koperasi. Bagi pemerintah daerah setempat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi

dan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kelembagaan Koperasi.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pengembangan Koperasi sebagai lembaga alternatif keuangan masyarakat perlu didukung, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Masyarakat berperan dalam pendirian Koperasi sedangkan pemerintah memberikan pembinaan kepada Koperasi. Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota Koperasi, maka salah satu unit usaha yang ditumbuhkembangkan Koperasi adalah unit simpan pinjam. Pinjaman ini sangat dibutuhkan oleh para anggota Koperasi dan banyak manfaat yang diperolehnya terutama dalam rangka meningkatkan modal usaha para anggotanya. Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman / kreditur (Koperasi) dengan pihak peminjam / debitur (anggota Koperasi) yang wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.

Namun dalam kegiatan pinjam-meminjam tentu ada resiko yang harus dihadapi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Adiwarmanto Karim (2004:VI) yang dikutip dari Firman Bahtiar (2007) dalam suatu teori keuangan, "*Return goes along with risk* (Pengembalian selalu beriringan dengan Resiko)".

Maksudnya adalah dimana ada pinjaman maka pengembaliannya akan memunculkan resiko dengan asumsi jika pinjaman tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan tidak ada monitoring yang berkesinambungan. Sehingga jika pinjaman besar maka *return* juga akan besar dan resiko yang dihadapi juga besar. Indikator dari *return* adalah pengembalian pinjaman yang diukur melalui

pendapatan hasil usaha yang dimiliki. Sedangkan indikator dari *risk* adalah NPL (*Non Performing Loan*) atau yang disebut dengan kredit bermasalah.

Guna meminimalkan resiko terjadinya kredit bermasalah atau tidak kembalinya pinjaman, maka Koperasi harus memegang teguh prinsip-prinsip dalam menganalisis kredit para anggotanya. Karena dengan munculnya kredit bermasalah maka akan mengganggu kestabilan tingkat likuiditas yang dibutuhkan untuk permodalan usaha Koperasi, mengurangi pendapatan usaha dari bunga pinjaman dan mengganggu kelancaran pemberian kredit pada tahap selanjutnya.

Duanne B. Graddy dan Austin H. Spencer (1985:457) mengemukakan 5 (lima) prinsip analisis kredit (*Five Cs of Credit*) dalam suatu Teori Evaluasi Risiko Kredit (*Credit Risk Evaluation Theory*), yaitu :

1. *Character* (karakter pribadi debitur/peminjam).
2. *Capacity* (kemampuan mengembalikan kredit).
3. *Capital* (penggunaan modal sendiri).
4. *Condition* (kondisi perekonomian).
5. *Collateral* (jaminan kredit).

Kemudian prinsip 5C ini diperjelas kembali oleh Kasmir (2004 : 117), sebagai berikut :

1. *Character* (watak/perilaku)
Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.
2. *Capacity* (kemampuan)
Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan pemerintah.
3. *Capital* (modal)
Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan dengan melakukan pengukuran.

4. Condition of Economy (kondisi perekonomian)
Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.
5. Collateral (jaminan atau agunan)
Merupakan jaminan fisik maupun non fisik yang diberikan calon nasabah.

Berdasarkan analisis 5C, maka salah satu prinsip analisis kredit adalah watak / kepribadian (*character*) anggota Koperasi berupa kejujuran dan kooperatif anggota yang tercermin dari sikap dan perilakunya menaati perjanjian kredit yang telah disepakati. Namun tidak tertutup kemungkinan adakalanya ketidakjujuran dilakukan anggota dengan memberikan data-data fiktif. Selain itu, anggota Koperasi tidak dapat menggunakan pinjaman kedalam hal-hal yang lebih bermanfaat atau produktif karena wataknya kurang baik tanpa kemauan untuk melakukan pembayaran kredit, sehingga anggota Koperasi selalu mengalami pendapatan yang terus menurun. Seperti yang dikemukakan Siswanto Sutojo (1997:72), “Kredit yang diberikan kepada debitur yang berwatak buruk besar sekali resikonya untuk berkembang menjadi kredit yang bermasalah.”

Unsur lainnya yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan (*capacity*) anggota Koperasi dalam membayar pinjaman. Kemampuan kreditur dalam membayar kredit tergantung kepada tersedianya dana untuk melunasi kredit yang diperoleh dari pendapatan usahanya. Jika terjadi penurunan dalam jumlah pendapatan yang diterima, maka semakin kecil kemungkinan anggota Koperasi tersebut mampu mengembalikan kembali pinjaman yang dilakukannya.

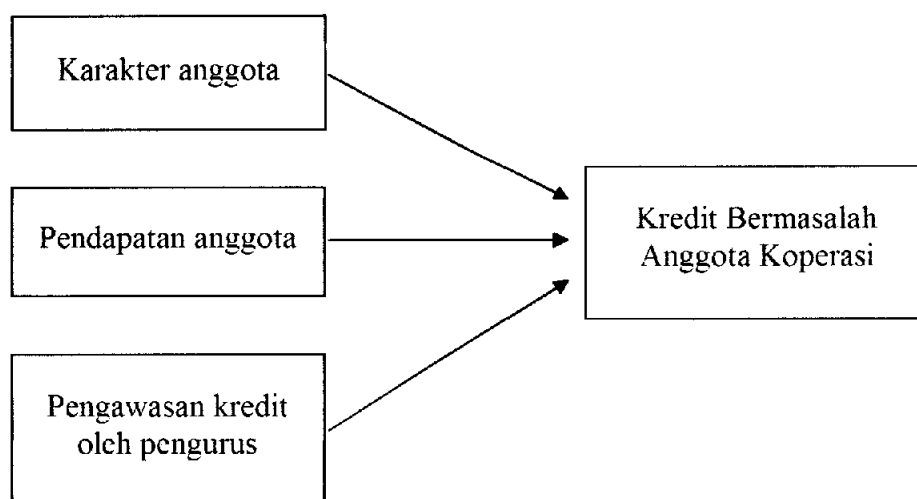
Janjte Lavrebtius Sepang (1994:80) yang dikutip dari Christine Kartini Barutu (2001) menyatakan : “Pendapatan dan tunggakan kredit mempunyai hubungan yang negatif.” Sehingga jika pendapatan semakin besar maka

tunggakkan kredit akan semakin kecil, sedangkan jika pendapatannya rendah maka tunggakkan kreditnya akan tinggi.

Faktor lainnya yang menyebabkan kredit anggota tidak lancar adalah kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan, baik pengawasan awal dan pengawasan rutin maupun pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan dilakukan dalam bentuk peninjauan kondisi usaha dan kekayaan debitur beserta perkembangannya, ataupun melalui penagihan kredit secara rutin dan berkesinambungan. Pentingnya pengawasan kredit dikemukakan oleh Rahmat Firdaus dan M. Ariyanti (2004:52) sebagai berikut :

Monitoring dan pengawasan kredit diperlukan sebagai upaya peringatan dini yang mampu mengantisipasi tanda-tanda penyimpangan dari syarat-syarat yang telah disepakati antara debitur dengan bank yang mengakibatkan menurunnya kuantitas kredit serta untuk meningkatkan tingkat kualitas atau kolektibilitas kredit yang bersangkutan.

Berdasarkan identifikasi masalah serta berbagai teori dan pendapat para ahli ekonomi di atas maka dapat ditarik suatu kerangka berfikir sebagai berikut :



1.5. Hipotesis

1.5.1 Hipotesis Mayor

Karakter anggota, pendapatan anggota, dan pengawasan kredit oleh pengurus secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

1.5.2 Hipotesis Minor

1. Karakter anggota berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pendapatan anggota berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pengawasan kredit oleh pengurus berpengaruh signifikan terhadap kredit bermasalah anggota Koperasi di KUD Tunas Karya Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep mengenai variabel-variabel yang diteliti, antara lain tentang Koperasi, KUD, kredit dan pengelolaannya, serta hubungan antara kredit bermasalah dengan karakter, pendapatan, dan pengawasan kredit.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, analisis hasil penelitian, pembahasan hasil pengujian hipotesis, serta implikasi pendidikan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diungkapkan peneliti dari hasil penelitian yang diperoleh.

